

Membangun Sistem yang Berhasil: Program Tata Pemerintahan UNDP

Membangun tata pemerintahan yang baik dalam segala aspeknya, termasuk menjamin penegakan hukum, meningkatkan efisiensi dan pertanggungjawaban sektor publik, dan menghapus praktek-praktek korup merupakan unsur penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Program Tata Pemerintahan UNDP (Program Pembangunan PBB) mendukung Indonesia dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya publik yang dimilikinya dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban sektor publik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya tata pemerintahan yang baik dan syarat-syarat untuk mewujudkannya.

Jalan Terbentang

Berbagai keputusan dan tindakan pemerintah membentuk masyarakat tempat kita tinggal. Namun, kepemimpinan yang lebih demokratis hanya dapat dihasilkan melalui proses konsultasi yang luas. Menggabungkan sumber-sumber daya dan pengetahuan dari berbagai pihak berkepentingan akan menghasilkan kebijakan yang mantap dan relevan, yang bermanfaat bagi negara secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia menganut falsafah ini sejak lama dan, dalam upaya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, telah meminta UNDP untuk turut ambil bagian dalam analisis dan dialog tentang masalah pemerintahan yang penting.

UNDP menanggapi dengan membentuk Program Tata Pemerintahan yang bertujuan untuk mencari bentuk kepemimpinan yang handal dan demokratis. Program ini mencoba membantu menyesuaikan kerangka, mekanisme dan kelembagaan

Pemerintah, untuk membentuk tatanan sosial yang lebih adil. Program Tata Pemerintahan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang saling berkaitan itu melalui berbagai kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan tata administrasi dan pelayanan jasa yang merata, mendukung keterlibatan penuh masyarakat sipil, dan mendorong pembaruan legislatif, sistem hukum dan kebijakan.

Uji Coba

Tanpa diuji dalam situasi yang sebenarnya, ide-ide besar hanya akan berdampak kecil. Oleh karena itu, landasan seluruh program ini baru saja disempurnakan untuk tahun 2004 dan seterusnya. Dengan menjalankan proyek contoh tata pemerintahan demokratis di beberapa propinsi terpilih dan bekerja sama dengan pejabat pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik, diharapkan warga akan merasakan dampak kehidupan yang lebih baik dan keterwakilan yang lebih memuaskan. Efek positif ini harus bisa dipertahankan. Untuk itu satu lagi fokus program telah ditambahkan yaitu upaya mengembangkan ketrampilan dan kepekaan pejabat pemerintah lokal untuk melaksanakan sistem tata pemerintahan yang lebih konsultatif dan berjangkauan luas di tingkat lokal dan selanjutnya di seluruh Indonesia.

Faktor-faktor Pendorong

UNDP, melalui suatu proses bertahap tiga, berupaya mencapai berbagai tujuan tersebut diatas. Pertama, sumber daya dan kapasitas lembaga publik seperti universitas, pusat pelatihan dan LSM di provinsi-provinsi sasaran akan ditingkatkan melalui identifikasi kebutuhan dan mencari cara

tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jejaring yang lebih kompak di antara lembaga-lembaga itu diharapkan akan bisa meningkatkan komunikasi dan saling pengertian, yang pada gilirannya akan meningkatkan peran mereka dalam memberi layanan publik dan menciptakan gaya pemerintahan yang lebih demokratis.

Kedua, masyarakat sipil berperan aktif membentuk sistem tata pemerintahan yang lebih dinamis dan demokratis. Dengan membantu membangun jejaring dan menghubungkan berbagai aktor masyarakat sipil, Program Tata Pemerintahan berusaha meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok ini untuk menuntun dan mendukung tata pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya kemampuan ini akan membantu para aktor masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan pemerintah lokal dan menuntun pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Adanya desentralisasi menciptakan tantangan dan kesempatan baru. Kelompok-kelompok masyarakat sipil perlu menangkap peluang-peluang baru ini untuk dapat mewujudkan perubahan.

Ketiga, pemerintah lokal dan pemerintah provinsi – eksekutif dan legislatif – dituntut untuk berperan aktif. Mereka akan dibantu untuk mengembangkan serta melindungi ruang demokrasi. Kedua badan ini perlu bekerja sama untuk memperoleh pengalaman yang lebih substantif dalam proses membentuk realitas tata pemerintahan yang benar-benar demokratis. Untuk itu UNDP telah membantu mendirikan dan mendukung Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, suatu forum independen multipihak (*stakeholder*), tempat menggodok proses pembaruan konstitusi, mendukung pemilu dan mengembangkan mekanisme tata pemerintahan yang lebih baik bagi Indonesia.

Sekalipun demokrasi di Indonesia masih tetap dihadapkan pada banyak tantangan, UNDP merasa bangga menjadi mitra dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih jujur dan adil yang akan tumbuh dan berkembang di Indonesia.



Wahana menyalurkan aspirasi